

**FILM TEMA PENDIDIKAN PADA MASA MENTERI PENERANGAN
MASHURI SALEH (1973-1977)**

(SKRIPSI)

Oleh

MUHAMMAD FAIZ ALGHIFARI

(2263033001)



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

FILM TEMA PENDIDIKAN PADA MASA MENTERI PENERANGAN MASHURI SALEH (1973-1977)

Oleh :

Muhammad Faiz Alghifari 2263033001

Film-Film bertema pendidikan pada perfilman Indonesia periode 1973–1977 pada masa Orde Baru. didasarkan pada perubahan arah kebijakan perfilman nasional yang mulai menempatkan film tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial, pembentukan moral, dan penyampaian nilai pembangunan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, film-film yang lolos tayang cenderung menampilkan tema keluarga, perjuangan hidup, pendidikan sosial, dan pembentukan karakter masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi. Sumber yang digunakan berasal dari arsip kebijakan Departemen Penerangan, surat keputusan menteri, kliping koran pada masa itu, Sumber penelitian diperoleh dari arsip surat kabar, poster film, dokumen kebijakan perfilman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perfilman, serta berbagai literatur mengenai perfilman Indonesia pada masa Orde Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 1973–1977 pemerintah mulai memperketat proses seleksi dan penyesuaian isi film sehingga film yang lolos tayang umumnya merupakan film yang memiliki nilai edukatif dan moral. Film seperti *Si Doel Anak Betawi*, *Sebatang Kara*, dan *Ateng Kaya Mendadak* yang memperlihatkan unsur pendidikan sosial melalui penggambaran perjuangan hidup, kerja keras, hubungan keluarga, dan kritik sosial ringan yang sesuai dengan arah pembangunan Orde Baru. Proses seleksi film, penyesuaian isi cerita, serta dominasi film dengan unsur pendidikan menunjukkan adanya hubungan erat antara perfilman nasional dan kepentingan ideologis negara. Dengan demikian, film bertema pendidikan pada masa tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam membentuk karakter masyarakat dan mendukung stabilitas sosial pada era Orde Baru. Selain itu, penyebaran film melalui bioskop keliling memperluas fungsi film sebagai media pendidikan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perfilman Indonesia pada periode tersebut berkembang sebagai media pendidikan sosial yang digunakan negara untuk membentuk moral, disiplin, dan kesadaran masyarakat sesuai dengan kebijakan budaya dan pembangunan Orde Baru.

Kata Kunci: *Departemen Penerangan, Film, Mashuri Saleh,*

ABSTRACT

EDUCATIONAL THEME FILM DURING THE TERM OF THE MINISTER OF INFORMATION MASHURI SALEH (1973–1977)

By :

Muhammad Faiz Alghifari 2263033001

*Educational-themed films in the Indonesian film industry during the 1973–1977 period of the New Order era were influenced by changes in national film policies that increasingly positioned film not only as a medium of entertainment, but also as a tool for social education, moral formation, and the dissemination of development values to society. In this context, films that passed censorship and were approved for screening generally presented themes of family, life struggles, social education, and character building within society. This research employs the historical method, which consists of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used include archives of the Ministry of Information policies, ministerial decrees, newspaper clippings from the period, film posters, film policy documents, Law Number 4 of 1969 concerning the Basic Provisions of Film, and various literatures discussing the Indonesian film industry during the New Order era. The results of this study show that during the 1973–1977 period, the government began tightening the selection process and adjusting film content, resulting in films that passed censorship generally containing educational and moral values. Films such as *Si Doel Anak Betawi*, *Sebatang Kara*, and *Ateng Kaya Mendadak* demonstrated elements of social education through depictions of life struggles, hard work, family relationships, and mild social criticism that aligned with the developmental orientation of the New Order regime. The process of film selection, the adjustment of story content, and the dominance of films containing educational elements indicate a close relationship between the national film industry and the ideological interests of the state. Thus, educational-themed films during this period became an important part of the government's strategy to shape public character and maintain social stability in the New Order era. In addition, the spread of films through mobile cinemas expanded the role of film as a medium of public education. This study concludes that the Indonesian film industry during this period developed as a medium of social education used by the state to shape morality, discipline, and public awareness in accordance with the cultural and developmental policies of the New Order government.*

Key Words : *Ministry of Information, Cinema, Mashuri Saleh,*

**FILM TEMA PENDIDIKAN PADA MASA MENTERI PENERANGAN
MASHURI SALEH (1973-1977)**

**Oleh :
MUHAMMAD FAIZ ALGHIFARI**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada
Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**Judul Skripsi : FILM TEMA PENDIDIKAN PADA MASA
MENTERI PENERANGAN MASHURI SALEH
(1973-1977)**

Nama Mahasiswa : Muhammad Faiz Alghifari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2263033001

Jurusan : Pendidikan IPS

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Sumargono, M.Pd.
NIP. 198801082019031012**

**Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199310262019031009**

2. MENGETAHUI

**Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,**

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,**

**Dr. Dedy Miswar, S.Si, M.Pd.
NIP. 197411082005011003**

**Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sumargono, M.Pd.

Sekretaris

: Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Drs. Syaiful, M., M.Si

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Alhet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faiz Alghifari
NPM : 2263033001
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : PIPS/Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Sultan Haji, Gg. Cempaka, No 27. Labuhan Ratu,
Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026



Muhammad Faiz ALGhifari

NPM. 2263033001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 November 2003. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Nazrin dan Ibu Laila. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar I Bandar Lampung (2010-2016), Pendidikan Tahfidzh Qur'an Terpadu (PTQT) Al-Hikmah Cirebon (2016-2019), dan kemudian melanjutkan Madrasah Alyiah (MA) Darul Ulum Lampung (2019 2022). Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur Prestasi Hafalan Qur'an.

Pada Semester V Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang dan melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Aji. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan juga sering mengikuti program yang disediakan oleh kampus antara lain: Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS), sebagai Kepala Bidang Kerohanian (2024) di Forum Komunikasi Mahasiswa (FOKMA) Pendidikan Sejarah Menjadi Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Basket Univeritas Lampung (2024) dan berhasil menjuarai Kompetisi Pekan Olahraga Mahasiswa Cabang Olahraga Bola Basket. Selain itu, penulis pernah mengikuti beberapa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain: Wirausaha Merdeka dan MBKM Riset dan Penelitian Dosen. Penulis juga aktif menjadi moderator dan aktif dalam kegiatan perlombaan kepenulisan seperti PKM dan P2MW.

MOTO

“No one ever laid out the steps; it’s something you have to figure out..”

(Chris Gardner)

“If you’re nothing without the suit, then you shouldn’t have it.”

(Tony Stark On A Film ”Spider-Man: Homecoming)

”KERJAIN AJA APA YANG BISA”

(ABI)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat serta Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya dinantikan di Yaumul Kiamah nanti, Aamiin. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Nazrin dan Ibu Laila yang telah melahirkan saya kedunia ini, merawat, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan moril dan materil tanpa henti, membimbing tanpa lelah dan tanpa henti, senantiasa mendoakan saya tiap detik, menit, dan jam disetiap harinya, serta selalu berjuang agar saya bisa mencapai segala cita-cita saya. Dan teruntuk teruntuk saudari kebanggan saya Ayuk Alya dan adik kandung tersayang Hafidz, Api, dan Fatih terimakasih karena selalu memberikan dukungan, selalu mengerti, dan selalu mendoakan agar dipermudah dalam segala sesuatunya, terutama dalam menjalankan studi.

Untuk Almamater Tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Allhamdulillahirobbil'aalamin,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul **“Film Tema Pendidikan Pada Masa Menteri Penerangan Mashuri Saleh (1973-1977) ”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum. Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Dr. Sumargono, M.Pd. sebagai pembimbing I sekaligus pembimbing akademik penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan, dan

- kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung
8. Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing II skripsi penulis terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
 9. Bapak Drs. Syaiful, M., M.Si. sebagai Pembahas skripsi penulis terima kasih ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
 10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan Staf Administrasi terima kasih atas ilmu dan bantuan dalam bentuk apapun, serta dukungan, motivasi, dan pengalaman yang diberikan selama proses belajar.
 11. Bapak Dian Antariska, S.Pd. sebagai staf Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di Program Studi Pendidikan Sejarah.
 12. Kedua orangtua yang sangat berjasa dalam hidup saya, Ibu Laila Sari El-Husna dan Bapak Nazrin Rosyadi. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin dari kalian. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
 13. Teruntuk saudari kebanggan saya ayuk Alya dan adik kandung tersayang Hafidz, Api, Fatih, Dan yang sedang di dalam perut terima kasih sudah menjadi penyemangat ketika lelah dan menjadi alasan untuk pulang ke rumah.
 14. Kepada Penghuni kosan terelit se Bandar Lampung, Kosan Kurnia Ilahi, Febsa Pembalap, Barkah Pasir, Uda Padang Alfathani. Terimakasih karena telah menjadi kosan ternyaman yang bisa menampung penulis ketika melaksanakan pendidikan.
 15. Teruntuk Teman Teman Kelas C, Terima kasih Karena telah menjadi kelas terbaik sepanjang masa.

16. Terimakasih kepada alm. Kobe Bryant yang telah menyemangati lewat kata kata motivasi yang Kobe berikan, yang selalu memberi semangat ketika penulis sedang tidak percaya diri.
17. Dan yang terakhir yang selalu menemani saya, Orang paling special di muka bumi ini, Tazkia Karimah, terimakasih karena telah selalu menemani penulis pada saat skripsi ini dikerjakan.

Bandar Lampung, Juni 2026

Muhammad Faiz Alghifari
NPM. 2263033001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABLE.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Berfikir.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Kerangka Teori	9
2.2.1 Teori <i>Hegemonic Cinema</i>	9
2.3 Kerangka Konsep	11
2.3.1 Konsep Perfilman Nasional.....	11
2.3.2 Konsep Regulasi Perfilman	12
2.3.3 Konsep Film Pendidikan Indonesia.....	14
2.4 Penelitian Terdahulu	15
III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	19
3.2 Metode Penelitian.....	19
3.2.1 Heuristik	20
3.2.2 Kritik	21
3.2.3 Interpretasi.....	22
3.2.4 Historiografi	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.3.1 Teknik Dokumentasi.....	24
3.3.2 Teknik Kepustakaan	24
3.4 Teknik Analisis Data	25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil	26
4.1.1 Gambaran Umum	26
4.1.2 Penyesuaian Isi Film	29
4.2 Pembahasan	64
4.2.1. Penyesuaian Isi Film	64
4.2.2 Seleksi Film.....	71
4.2.3 Film Yang Lolos Tayang Periode 1973-1977	76
V. KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Foto pembukaan Musyawarah Perfilman Nasional 1971.....	28
Gambar 2. Potongan Koran PERFIKI.....	29
Gambar 3. Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia.....	33
Gambar 4. Potongan Surat Kabar	38
Gambar 5. Poster Film Sebatang Kara.....	42
Gambar 6. Poster Film Si Doel Anak Betawi.....	44
Gambar 7. Potongan Surat Kabar	47
Gambar 8. Poster Film Ateng Kaya Mendadak.....	50
Gambar 9. Poster Film Kampus Biru (1976).....	53
Gambar 10. Poster Film Dr. Karmila.....	55
Gambar 11. Poster Film Harmonikaku.....	57
Gambar 12. Potongan Surat Kabar.....	59
Gambar 13. Potongan Surat Kabar.....	60

DAFTAR TABLE

Table	Halaman
Table 1. Jumlah Film Impor dan Film Nasional tahun 1974-1991.....	36

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semenjak kemunculan pertamanya film telah menjadi fenomena yang menarik. Dengan diiringi perkembangan teknologi dan penerapannya, film dapat dimasukkan baik sebagai hiburan saja hingga luapan ekspresi pembuatnya, sebagai media penyampaian pesan yang dipandang efektif, dan dengan kemampuannya menangkap jejak sejarah perkembangan peradaban sebuah bangsa maupun dunia dan masih banyak lagi kajian yang dapat diambil dari film. Mengkaji dunia perfilman adalah usaha untuk melihat film dalam potensinya untuk dijadikan media komunikasi yang efektif karena kemampuannya memadukan setidaknya dua teknologi media sekaligus yaitu audio & visual. Oleh karena itu, munculnya film sebagai salah satu cabang kesenian nampaknya makin meyakinkan banyak peneliti, bahwa ada banyak hal yang mereka bisa lakukan dengan mempelajari film (Sen, 1994).

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menempatkan media massa sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membentuk arah pemikiran masyarakat. Setelah pergantian kekuasaan menuju rezim Suharto, negara mulai membangun sistem politik yang menekankan keteraturan, pembangunan, dan kontrol sosial. Dalam konteks tersebut, berbagai bentuk media, termasuk film, tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menyampaikan ideologi negara kepada masyarakat luas. Film dianggap memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi cara berpikir, perilaku, serta pandangan masyarakat terhadap realitas sosial dan politik (Heider, 1991)

Fenomena perfilman Indonesia pada tahun 1973–1977 menjadi menarik untuk dikaji karena periode ini memperlihatkan perubahan besar dalam hubungan antara negara dan media budaya. Setelah Orde Baru berhasil memperkuat kekuasaan politiknya, pemerintah mulai menyadari bahwa pengaruh film terhadap masyarakat sangat besar, terutama dalam membentuk cara pandang sosial dan politik publik. Film tidak lagi dipahami hanya sebagai hiburan komersial, melainkan sebagai sarana komunikasi

ideologis yang mampu menjangkau masyarakat secara luas. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong negara untuk terlibat lebih jauh dalam mengatur arah perkembangan perfilman nasional (Hadi, 2012)

Pada masa tersebut, Departemen Penerangan mengambil peran penting dalam menentukan orientasi perfilman Indonesia. Pemerintah berupaya membangun citra nasional yang stabil, tertib, dan mendukung pembangunan. Oleh karena itu, film diarahkan agar mampu menjadi alat edukasi sosial yang menanamkan nilai disiplin, nasionalisme, kerja keras, dan kepatuhan terhadap negara. Kehadiran Badan Sensor Film (BSF) menjadi bagian penting dalam proses ini karena lembaga tersebut bertugas menyaring isi film agar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Melalui sensor, negara dapat menentukan batas-batas narasi yang boleh muncul di ruang public, Perfilman pada periode 1973–1977 memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik bekerja melalui media Film-film yang dianggap mengandung kritik terhadap pemerintah, konflik sosial yang sensitif, atau gagasan yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik cenderung mengalami pemotongan bahkan pelarangan tayang. Sebaliknya, film yang mendukung citra pembangunan nasional dan harmoni sosial memperoleh ruang yang lebih besar untuk diproduksi dan diedarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perfilman pada masa awal Orde Baru telah menjadi bagian dari strategi negara untuk menjaga legitimasi kekuasaan melalui pembentukan opini masyarakat (Novia, 2006).

Memasuki era Orde Baru, otoritas pemerintah atas industri perfilman semakin jelas. Ada banyak peraturan. Kebijakan film ditentukan sebagian besar oleh menteri penerangan. Setiap produk dilarang secara langsung. Ini dilakukan karena dianggap menyimpang dari ideologi negara atau berpotensi menimbulkan kemarahan publik. Akibatnya, batasan politik yang ketat mengharuskan sineas untuk mengubah ide-ide mereka. Film tersebut kemudian digunakan sebagai alat propaganda Orde Baru untuk mendapatkan legitimasi politik. Film biasanya menampilkan pemerintah sebagai peran utama dalam menjaga stabilitas negara. Ideologi Pancasila dihargai, sementara pendukungnya digambarkan secara negatif. Film secara efektif menyebarkan ideologi negara selain berfungsi sebagai hiburan. (Alkhajar, 2013)

Film Pengkhianatan G30S/PKI, yang diwajibkan untuk ditonton di institusi pemerintah maupun sekolah-sekolah, adalah contoh paling jelas dari penggunaan film sebagai alat propaganda. Film tersebut tidak hanya menceritakan satu versi sejarah, tetapi juga menegaskan peran pemerintah sebagai pembela negara dari ancaman komunisme. Akibatnya, film menjadi alat penting untuk memperkuat ingatan kolektif untuk kepentingan penguasa.

Melihat kondisi negara yang masih belum stabil, Presiden Soekarno berinisiatif membuat penyatuan dalam Demokrasi Terpimpin yang kemudian menerima banyak tantangan dan hambatan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno juga memunculkan aksi pemboikotan film-film yang berasal dari luar negeri. Pada masa Orde Baru di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1966-1998, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengendalikan industri perfilman, perfilman nasional menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam bidang perfilman menjadi penting dalam upaya membangun identitas kebangsaan dan mengontrol aliran informasi serta budaya yang masuk ke masyarakat. Salah satu tokoh sentral dalam mengawasi sektor ini adalah Menteri Penerangan, yang mana pada periode 1973-1977 yang dijabat oleh Bapak Mashuri Saleh berperan besar dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang positif, Menteri Mashuri menjabat di saat yang krusial dalam sejarah perfilman Indonesia. Era 1970-an merupakan periode penting di mana industri film Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dari segi produksi maupun konten (Misbach, 2009).

Mashuri Saleh, yang menjabat sebagai Menteri Penerangan dari tahun 1973 hingga 1977, memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan mengarahkan industri film Indonesia. Sebelumnya, industri film Indonesia telah mengalami masa keemasan pada era 1950-an hingga awal 1960-an, di mana film-film Indonesia meraih popularitas dan kesuksesan komersial yang besar (Prasetyo, 2015). Namun, pada era Orde Baru, terjadi perubahan signifikan dalam politik perfilman. Selama Orde Baru, pemerintah berusaha untuk mengembalikan kestabilan ekonomi dan politik setelah beberapa krisis sebelumnya. Dengan mendorong industri kreatif,

termasuk industri film, pemerintah berusaha memperkuat legitimasi pemerintah dan menciptakan identitas kebangsaan yang baru.

Konteks perfilman Indonesia tahun 1973–1977, negara tidak selalu menggunakan tindakan represif secara langsung, melainkan membentuk kesadaran masyarakat melalui tayangan yang telah disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Film menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai tertentu agar diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan benar. Salah satu contoh film yang mencerminkan arah kebijakan perfilman Orde Baru adalah *Si Doel Anak Betawi* karya Sjunan Djaya. Film ini menampilkan kehidupan masyarakat Betawi dengan penekanan pada nilai keluarga, kesederhanaan, penghormatan kepada orang tua, dan kerja keras. Tema tersebut dianggap sejalan dengan visi pemerintah mengenai moralitas sosial dan pembangunan masyarakat. Karena tidak mengandung kritik politik yang tajam, film semacam ini dapat diterima dan lolos sensor dengan relatif mudah.

Kebijakan sensor juga membatasi ruang kreativitas para sineas. Banyak sutradara dan penulis skenario harus menyesuaikan isi cerita dengan aturan tidak tertulis yang berkembang pada masa itu. Narasi yang dianggap sensitif secara politik cenderung dihindari demi memperoleh izin edar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa produksi budaya pada era Orde Baru berada dalam pengaruh kuat negara, sehingga kebebasan berekspresi dalam perfilman mengalami pembatasan yang cukup ketat. Menariknya, meskipun berada di bawah kontrol negara, perfilman Indonesia pada periode ini tetap mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu media populer di masyarakat. Film berhasil menjadi ruang penyebaran nilai sosial sekaligus hiburan yang efektif. Hal ini menjadikan film sebagai sumber sejarah yang penting karena mampu merekam hubungan antara kekuasaan politik, budaya populer, dan kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru. Penelitian mengenai perfilman Indonesia tahun 1973–1977 menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana negara menggunakan media budaya sebagai alat kontrol ideologis. Selama ini, kajian mengenai Orde Baru lebih banyak berfokus pada politik dan ekonomi, sementara pembahasan mengenai kebijakan perfilman sebagai instrumen kekuasaan masih relatif terbatas. Padahal, film memiliki peran

besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan nilai-nilai pembangunan kepada masyarakat.

Penelitian terkait dengan topik ini sudah pernah ada yang membahas tetapi belum secara eksplisit mengulas tentang kebijakan peran menteri penerangan, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudo Sedio Utomo membahas secara luas perkembangan film dari tahun 1967-1977, Yudo juga menyebutkan dalam penelitiannya yang berfokus pada perubahan umum kebijakan pemerintah terhadap industri film Indonesia selama awal Orde Baru, tetapi belum menyebutkan bahwa menteri penerangan membuat kebijakan tentang Dewan Film Nasional dan Dewan Sensor Film Nasional, sementara itu penelitian saya berfokus pada peran Menteri Penerangan yaitu Mashuri Saleh yang menjabat selama periode 1973-1977, dalam merumuskan kebijakan perfilman yang menjadi cikal bakal langsung pada lahirnya DFN (Dewan Film Nasional) dan DSF (Dewan Sensor Film). Di samping itu, penggunaan teori hegemoni Gramsci menjadikan penelitian ini lebih konseptual dan interpretatif dibanding penelitian Yudo Sedio Utomo yang cenderung faktual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dibuatlah rumusan masalah terhadap penelitian ini, yaitu : Apa sajakah Film Tema Pendidikan Pada Masa Menteri Penerangan Mashuri Saleh (1973-1977)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Apa sajakah Film Tema Pendidikan Pada Masa Menteri Penerangan Mashuri Saleh (1973-1977).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah serta tujuan dari penelitian ini mengenai

bagaimana kontrol ideologi melalui Badan Sensor Film dan standar aturan dalam film genre pendidikan untuk membentuk citra moral pemerintah.

Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Lampung

Membantu para civitas akademika lainnya untuk dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana kontrol ideologi melalui Badan Sensor Film dan standar aturan dalam film genre pendidikan untuk membentuk citra moral pemerintah.

b. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam mengkaji bagaimana kontrol ideologi melalui Badan Sensor Film dan standar aturan dalam film genre pendidikan untuk membentuk citra moral pemerintah

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang kesejarahan, yaitu mengenai bagaimana kontrol ideologi melalui Badan Sensor Film dan standar aturan dalam film genre pendidikan untuk membentuk citra moral pemerintah.

d. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan mengenai bagaimana kontrol ideologi melalui Badan Sensor Film dan standar aturan dalam film genre pendidikan untuk membentuk citra moral pemerintah.

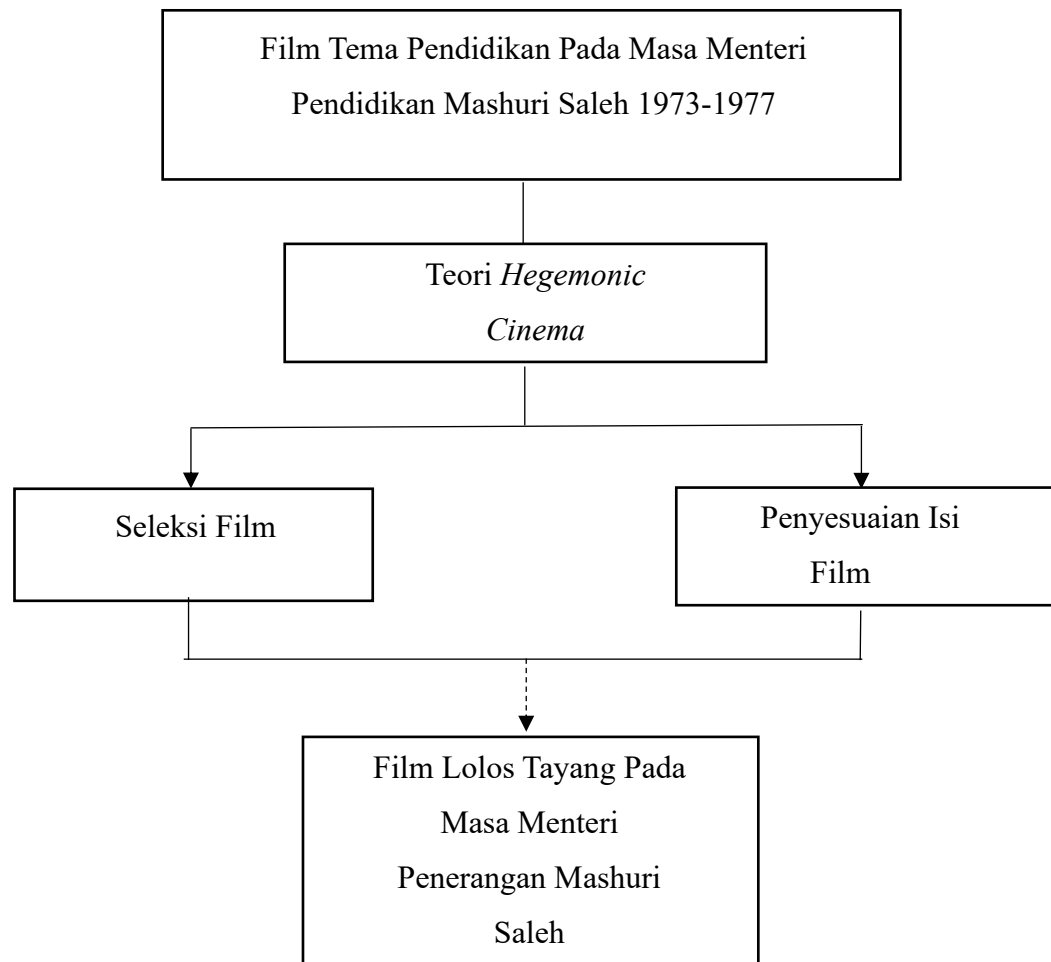
1.5 Kerangka Berfikir

Film adalah media yang tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang memiliki kemampuan untuk mengubah cara orang melihat dunia terutama politik dan sosial. Film pada masa Orde Baru sering digunakan di Indonesia untuk menyebarkan pesan moral, nasionalisme, atau bahkan ideologi tertentu. Film memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik, yang membuatnya menjadi media strategis yang sering mendapat perhatian pemerintah, terutama saat politik tidak stabil. Pada masa Orde Baru, pemerintah memiliki otoritas besar atas industri film dan kehidupan sosial dan budaya lainnya.

Untuk memastikan bahwa konten film tidak bertentangan dengan ideologi negara, lembaga pemerintah seperti Departemen Penerangan menerapkan sistem sensor dan izin tayang. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas moral dan politik masyarakat, mereka juga membatasi ruang kebebasan bagi para pembuat film untuk berekspresi secara kreatif.

Kebijakan yang diterapkan ini sangat ketat membuat banyak sutradara harus mengikuti aturan pemerintah agar film mereka dapat diproduksi dan ditayangkan. Oleh karena itu, tema-tema film menjadi bosan dan biasanya mendukung narasi pemerintah. Walaupun jumlah film Indonesia terus meningkat, kualitasnya merosot karena banyak yang tidak berani menunjukkan realitas sosial yang sebenarnya. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan film dipengaruhi oleh ekonomi dan teknologi serta kekuasaan politik, Dunia perfilman mulai menerima kebebasan ekspresi setelah masa Orde Baru berakhir. Oleh karena itu, hubungan yang terjadi antara negara dan film dapat dianggap sebagai gambaran tentang bagaimana kekuasaan politik membentuk budaya populer masyarakat.

1.6 Paradigma Penelitian



Garis Hubung —————

Garis Hasil - - - - -

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangatlah dibutuhkan dalam penyusunan suatu penelitian, yang mana memuat terkait dengan pengumpulan kajian literatur yang sesuai dengan penelitian, untuk dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam suatu penelitian dengan menganalisis serta membandingkan sebelum direkonstruksi kembali. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dalam memahami konteks permasalahan yang akan dikaji, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keaslian suatu penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori *Hegemonic Cinema*

Teori *Hegemonic Cinema* yang dikembangkan oleh Richard Dyer menjelaskan bahwa film bukan sekadar media hiburan, melainkan juga sarana yang digunakan untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai yang dianggap ideal oleh kelompok dominan dalam masyarakat. Menurut Dyer, film memiliki kemampuan untuk membentuk cara pandang penonton terhadap realitas sosial melalui representasi tokoh, alur cerita, konflik, serta penyelesaian masalah yang ditampilkan di layar. Nilai-nilai yang terus-menerus ditampilkan dalam film dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar dan benar oleh masyarakat sehingga secara tidak langsung membentuk kesadaran sosial penontonnya. Dengan demikian, film menjadi salah satu instrumen budaya yang berperan dalam mempertahankan dan memperkuat hegemoni kelompok yang berkuasa.

Dalam konteks perfilman Indonesia pada masa Orde Baru, teori *Hegemonic Cinema* relevan digunakan untuk memahami hubungan antara negara dan industri perfilman. Pada periode 1973–1977, pemerintah melalui Departemen Penerangan dan Badan Sensor Film tidak hanya mengawasi isi film, tetapi juga mengarahkan perfilman nasional agar mendukung tujuan pembangunan

nasional. Film-film yang memperoleh izin edar umumnya menampilkan nilai-nilai seperti kerja keras, kedisiplinan, tanggung jawab, keharmonisan keluarga, serta kepatuhan terhadap norma sosial. Melalui proses tersebut, film berfungsi sebagai media penyampaian ideologi pembangunan yang diharapkan dapat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat tanpa adanya paksaan secara langsung.

Menurut Dyer, hegemoni dalam film bekerja melalui penciptaan representasi yang dianggap normal dan ideal oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dilihat pada film-film yang lolos sensor selama masa Menteri Penerangan Mashuri Saleh. Tokoh-tokoh utama dalam film seperti *Si Doel Anak Betawi*, *Sebatang Kara*, dan *Cintaku di Kampus Biru* sering digambarkan sebagai individu yang berjuang untuk memperoleh pendidikan, menjaga moralitas, menghormati keluarga, serta berusaha memperbaiki kondisi hidup melalui cara-cara yang positif. Representasi tersebut menunjukkan bahwa film tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga menghadirkan model perilaku yang dianggap sesuai dengan cita-cita pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat yang diinginkan pemerintah pada masa itu.

Teori Hegemonic Cinema juga membantu menjelaskan mengapa film-film tertentu lebih mudah lolos sensor dibandingkan film lainnya. Dalam perspektif Dyer, film yang mampu mereproduksi nilai-nilai dominan akan memperoleh ruang yang lebih besar untuk diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat. Sebaliknya, film yang mengandung kritik tajam terhadap pemerintah, mempertanyakan legitimasi kekuasaan, atau menampilkan nilai yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara cenderung mengalami pembatasan melalui mekanisme sensor. Oleh karena itu, proses sensor film pada masa Orde Baru tidak hanya bertujuan menjaga moralitas publik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme seleksi budaya yang memastikan bahwa pesan-pesan yang diterima masyarakat tetap sejalan dengan kepentingan negara dan agenda pembangunan nasional.

Berdasarkan pemikiran Richard Dyer, film-film yang lolos tayang pada periode 1973–1977 dapat dipahami sebagai bagian dari praktik hegemoni budaya yang

dijalankan negara melalui media film. Nilai-nilai pendidikan, moral, dan pembangunan yang ditampilkan dalam film bukan hanya berfungsi sebagai hiburan atau pesan etis semata, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial masyarakat. Dengan menggunakan teori Hegemonic Cinema, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu film memperoleh izin edar pada masa Orde Baru tidak terlepas dari kemampuannya merepresentasikan nilai-nilai yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, film menjadi salah satu instrumen penting dalam proses penyebaran ideologi pembangunan sekaligus pembentukan masyarakat yang mendukung stabilitas dan tujuan politik negara pada masa tersebut.

2.3 Kerangka Konsep

2.3.1 Konsep Perfilman Nasional

Konsep kebijakan budaya dan kontrol negara mengacu pada bagaimana cara pemerintah menggunakan kebijakan tertentu untuk mengatur, membatasi, dan mengarahkan kegiatan budaya masyarakat agar sesuai dengan tujuan politik dan ideologi negara. Konsep ini berakar pada gagasan bahwa film, harus menjadi alat pendidikan moral, meneguhkan Pancasila, dan menciptakan stabilitas sosial di Indonesia selama Orde Baru. Menurut Ardhana (2019), pemerintah melihat kebudayaan seperti film ini sebagai cara strategis untuk menjaga ketertiban negara, sehingga mereka mengawasi ketat setiap ekspresi seni yang dianggap menyimpang dari ideologi negara. Konsep kebijakan budaya dan kontrol negara ini menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan tertentu untuk mengatur kegiatan budaya masyarakat agar sesuai dengan ideologi dan keuntungan politik mereka. Dalam konteks penelitian saya, konsep tersebut tampak jelas selama masa jabatan Mashuri Saleh dari tahun 1973 hingga 1977, ketika Departemen Penerangan memberlakukan kebijakan ketat terhadap perfilman nasional. Produksi dan distribusi film diawasi oleh pemerintah melalui lembaga seperti Dewan Film Nasional (DFN) dan Dewan Sensor Film (DSF) untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan moralitas nasional dan prinsip propaganda Pancasila. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep ini meningkatkan pemahaman tentang

bagaimana kebijakan budaya digunakan sebagai alat hegemoni negara untuk mengontrol ekspresi kreatif dan sekaligus memperkuat legitimasi politik Orde Baru.

Konsep kebijakan budaya dan kontrol negara pada penelitian ini menekankan bahwa otoritas negara tidak hanya mengawasi konten film, tetapi juga mengatur distribusi, izin produksi, dan peredaran film di luar negeri. Ardhana (2019) menjelaskan dalam jurnalnya, pemerintah membatasi masuknya film internasional untuk melindungi budaya nasional. Meskipun demikian, ada dua sisi kebijakan tersebut: satu melindungi perfilman lokal dari pengaruh luar, dan yang lain mempersempit kompetisi dan kebebasan berkarya. Dengan kata lain, kontrol negara digunakan sebagai alat hegemoni ideologis untuk mempertahankan otoritas politik dengan mengontrol budaya. Film dirancang untuk menunjukkan wajah Indonesia yang kuat, aman, dan berdasarkan Pancasila. Pemerintah, melalui doktrin "pembangunan nasional", mendorong pembuatan film yang berfokus pada pembangunan, keteladanan, dan kehidupan desa yang harmonis. Ardhana (2019) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa strategi ini memiliki dua tujuan yaitu memperkuat identitas nasional dan mengalihkan perhatian publik dari konflik politik. Secara keseluruhan kebijakan budaya yang digunakan pemerintah untuk melegitimasi kekuasaan dan mengontrol kreativitas seni untuk kepentingan politik. Dari konsep ini kita bisa melihat pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar selaras dengan ideologi resmi negara. (Ardhana, 2019)

2.3.2 Konsep Regulasi Perfilman

Konsep Regulasi perfilman dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol, mengawasi, dan mengarahkan pertumbuhan industri film sesuai dengan ideologi dan tujuan politik pemerintah. Menurut Yudo Sedio Utomo (2018) dalam jurnalnya menyebut, peraturan perfilman di masa Orde Baru memiliki tujuan ideologis dan administratif. Mereka berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan stabilitas politik, nasionalisme, dan prinsip pembangunan. Film tidak sekadar hiburan atau seni; pemerintah menggunakannya sebagai alat strategis untuk menciptakan citra negara dan menyebarkan ide-ide politik yang dikontrol secara terpusat. Dalam periode 1973-1977, di bawah kepemimpinan Menteri Penerangan Mashuri Saleh, regulasi perfilman mencerminkan pendekatan yang kuat dari

negaraterhadap sektor kebudayaan. Semua aspek perfilman, mulai dari produksi, peredaran, hingga penayangan film, diawasi oleh Departemen Penerangan oleh kebijakan pemerintah. Struktur regulasi yang ketat diciptakan oleh kebijakan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Utomo (2018) dalam jurnalnya. Ini termasuk pembentukan lembaga seperti Dewan Film Nasional dan peningkatan Dewan Sensor Film (DSF). Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ini, negara memiliki otoritas untuk memutuskan film mana yang layak ditonton masyarakat berdasarkan standar ideologis dan moral publik.

Konsep regulasi perfilman pada masa Orde Baru juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma “politik kebudayaan negara”, di mana seluruh ekspresi seni harus tunduk pada nilai-nilai pembangunan nasional. Film dianggap memiliki kapasitas yang signifikan untuk membentuk pendapat publik dan memengaruhi kesadaran sosial masyarakat. Oleh karena itu, Utomo (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa setiap film yang dibuat harus menunjukkan semangat pembangunan, ketertiban sosial, dan penghormatan terhadap pemerintah. Secara tidak langsung, undang-undang ini membatasi kemampuan sineas untuk mendiskusikan masalah sosial atau politik yang dianggap sensitif, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan kritik terhadap kebijakan negara.

Konsep regulasi perfilman nasional dalam penelitian Yudo Sedio Utomo (2018) menggambarkan hubungan yang erat antara kekuasaan politik dan ekspresi budaya. Regulasi bukan hanya instrumen hukum, melainkan juga strategi ideologis untuk menanamkan loyalitas terhadap negara dan mengontrol arus informasi di masyarakat. Konsep regulasi perfilman berkonsentrasi pada metode hukum dan administratif yang digunakan pemerintah untuk mengontrol kemajuan industri film. Kaitannya dengan penelitian ini adalah regulasi perfilman sangat penting karena kebijakan yang dibuat selama pemerintahan Mashuri Saleh bertujuan untuk meningkatkan peran negara dalam industri film nasional. Kebijakan tersebut menghasilkan penciptaan Dewan Film Nasional, yang bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas, isi, dan pesan moral film Indonesia. Selain itu, peran yang lebih besar dari Lembaga Sensor Film (LSF) menunjukkan bagaimana peraturan digunakan untuk memilih film berdasarkan ideologi negara. Penelitian dapat

menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan film sebagai alat politik dan sarana untuk membangun identitas nasional di bawah kontrol negara dengan menganalisis peraturan ini (Utomo, 2018).

2.3.3 Konsep Film Pendidikan Indonesia

Konsep film pendidikan dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial, budaya, dan ideologis. Dalam konteks Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, film dipandang memiliki kemampuan besar dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Karena sifat audiovisualnya yang mudah diterima berbagai kalangan, film menjadi media efektif untuk menyampaikan nilai, norma, dan pesan tertentu kepada publik secara luas. Oleh sebab itu, pemerintah mulai menempatkan perfilman sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Pandangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perfilman yang menegaskan bahwa perfilman nasional berfungsi sebagai media penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan, dan ekonomi. Dalam undang-undang tersebut, film diarahkan agar mampu mendukung tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak memandang film sebagai produk budaya yang bebas sepenuhnya, melainkan sebagai media yang harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara (Kristanto., 2007).

Konsep film pendidikan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai film yang mengajarkan materi pembelajaran formal, tetapi lebih luas sebagai film yang menanamkan nilai moral, disiplin, nasionalisme, kerja keras, serta kepatuhan terhadap norma sosial. Film pendidikan menjadi alat pembentukan karakter masyarakat melalui cerita, tokoh, dan pesan yang ditampilkan dalam layar. Dengan demikian, film memiliki fungsi pedagogis yang dapat mempengaruhi kesadaran sosial masyarakat secara perlahan melalui budaya populer. Pada masa Orde Baru, konsep film pendidikan berkembang sejalan dengan visi pembangunan pemerintah. Negara mendorong lahirnya film-film yang dianggap mampu membangun citra masyarakat ideal sesuai arah kebijakan nasional. Tema-tema seperti stabilitas sosial, pembangunan desa, pentingnya pendidikan, penghormatan kepada orang tua, serta

semangat persatuan lebih banyak mendapat dukungan. Sebaliknya, film yang mengandung kritik politik, konflik ideologis, atau narasi yang dianggap mengganggu stabilitas nasional sering kali dibatasi melalui mekanisme sensor. Dalam praktiknya, Badan Sensor Film (BSF) memiliki peran penting dalam menentukan apakah sebuah film dianggap mendidik atau tidak. Sensor tidak hanya dilakukan terhadap unsur kekerasan dan kesusilaan, tetapi juga terhadap gagasan dan pesan sosial yang terkandung dalam film. Negara secara tidak langsung menentukan nilai apa yang boleh disampaikan kepada masyarakat melalui perfilman. Oleh karena itu, konsep film pendidikan pada masa tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ideologis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan (Trianton., 2013).

Konsep ini dapat dianalisis menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci yang menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibentuk lewat budaya dan media. Film pendidikan pada masa Orde Baru menjadi salah satu alat hegemoni negara untuk membangun kesadaran masyarakat agar menerima nilai-nilai pembangunan sebagai sesuatu yang wajar dan ideal. Dengan kata lain, negara menggunakan film untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial, politik, dan nasionalisme tanpa harus menggunakan tekanan secara langsung. Berdasarkan uraian tersebut, konsep film pendidikan dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk pemanfaatan film oleh negara sebagai media pembentukan moral, sosial, dan ideologi masyarakat. Film tidak hanya diproduksi untuk tujuan hiburan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan menjaga stabilitas politik pada masa Orde Baru. Dengan demikian, penelitian ini melihat film pendidikan sebagai bagian dari strategi negara dalam membangun hegemoni melalui media budaya, khususnya perfilman nasional pada periode 1973–1977.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yudo Sedio Utomo (2018) dari Universitas Negeri Jakarta berjudul *“Kebijakan Perfilman Indonesia pada Masa Orde Baru (1967–1980)”* merupakan salah satu kajian historis penting yang membahas dinamika kebijakan pemerintah terhadap industri film Indonesia. Utomo menelusuri

bagaimana pemerintah, melalui Departemen Penerangan, mengatur kegiatan perfilman secara sistematis sejak awal berdirinya Orde Baru hingga menjelang dekade 1980-an. Penelitian ini menggambarkan bahwa film tidak hanya diposisikan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat negara untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pembangunan, stabilitas politik, serta semangat nasionalisme. Dalam studinya, Utomo menjelaskan bahwa peraturan film dibuat untuk meningkatkan peran ideologis negara, terutama selama pemerintahan Mashuri Saleh yang menjabat Menteri Penerangan dari tahun 1973 hingga 1978. Penguatan lembaga seperti Dewan Film Nasional (DFN) dan Lembaga Sensor Film (LSF) adalah bagian dari kebijakan kementerian ini. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isi film sesuai dengan moralitas, nilai-nilai Pancasila, dan tujuan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tugas Menteri Penerangan lebih dari sekadar tugas administratif; itu merupakan bagian dari sistem pengendalian politik yang dirancang secara khusus. Jurnal yang ditulis oleh Utomo sangat relevan dengan penelitian saya karena kebijakan perfilman sangat penting dalam strategi komunikasi politik Orde Baru pada masa itu.

2. Penelitian Utomo (2018) memberikan gambaran historis yang kuat tentang hubungan antara stabilitas politik dan kebijakan film. Ia menjelaskan bahwa negara berusaha untuk membangun identitas budaya yang dikontrol dari atas dengan membatasi film asing dan menetapkan kuota produksi film nasional. Utomo menggunakan pendekatan historis untuk menunjukkan bahwa kebijakan perfilman di masa Orde Baru merupakan bagian dari rencana ideologis untuk mengabdikan kepada pemerintah, bukan sekadar upaya ekonomi kreatif. Aspek sejarah ini memberikan konteks penting untuk penelitian Anda, terutama jika Anda ingin mempelajari dasar kebijakan Menteri Penerangan dan bagaimana hal itu berdampak pada kemajuan film nasional.

Secara keseluruhan, kelebihan penelitian Utomo (2018) terletak pada kekayaan data historis, kejelasan periodisasi, serta kemampuan menelusuri arah kebijakan perfilman secara konkret terhadap penelitian ini. Semua aspek tersebut dapat menjadi pendukung terhadap penelitian yang saya lakukan karena secara langsung memberikan bukti historis dan faktual yang kuat mengenai praktik kebijakan

perfilman pada masa Orde Baru. Yudo dalam skrisinya juga menyebutkan dalam penelitiannya yang berfokus pada perubahan umum kebijakan pemerintah terhadap industri film Indonesia selama awal Orde Baru, tetapi belum menyebutkan bahwa menteri penerangan membuat kebijakan tentang Dewan Film Nasional dan Dewan Sensor Film Nasional, sementara itu penelitian saya berfokus pada peran Menteri Penerangan yaitu Mashuri Saleh yang menjabat selama periode 1973-1977, dalam merumuskan kebijakan perfilman yang menjadi cikal bakal langsung pada lahirnya DFN (Dewan Film Nasional) dan DSF (Dewan Sensor Film) dan bagaimana reaksi industri perfilman dengan adanya kebijakan ini.

3. Penelitian oleh Fahri Musyafa (2025) dengan judul Strategi Komunikasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dalam Menyosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, penelitian ini sangat terkait karena penelitian yang saya lakukan dan penelitian Fahri yang membahas Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI). Fahri meneliti bagaimana lembaga tersebut menggunakan strategi komunikasi untuk mempromosikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Dalam penelitian saya lebih membahas kebijakan perfilman nasional Kementerian Penerangan masa Mashuri Saleh (1973–1977). Fungsi LSF sebagai alat negara untuk mengarahkan perilaku dan persepsi masyarakat terhadap film digariskan oleh keduanya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa negara masih menggunakan film sebagai alat strategis untuk membangun nilai dan etika mereka, baik di era Orde Baru maupun sekarang.

Fahri Musyafa berkonsentrasi pada strategi komunikasi lembaga sensor film dalam konteks kontemporer. Ini terutama berlaku untuk digitalisasi dan platform streaming yang mengaburkan batas sensor. Tujuannya adalah untuk menemukan cara yang efektif untuk membuat masyarakat sadar sensor mandiri. Sebaliknya, penelitian saya berkonsentrasi pada proses kebijakan yang menciptakan struktur kontrol perfilman, yang dimulai dari tahun 1973 hingga 1977, ketika Mashuri Saleh menjabat sebagai kepala Kementerian Penerangan. Oleh karena itu, Fahri menekankan peran lembaga sensor sebagai aktor komunikasi publik, sedangkan penelitian ini menekankan peran pemerintah sebagai aktor kebudayaan politik. Meskipun berbeda konteks, penelitian Fahri Musyafa dapat menjadi pendukung

penting bagi penelitian saya. Studi yang dilakukan oleh Fahri memperkuat gagasan bahwa kontrol film adalah bagian dari strategi kebudayaan jangka panjang Indonesia. Hingga saat ini, prinsip-prinsip moral, ideologis, dan nasionalisme yang ditanamkan oleh kebijakan Menteri Mashuri Saleh selama Orde Baru masih menjadi landasan untuk pengawasan dan pengawasan perfilman. Hal ini menunjukkan bahwa politik kebudayaan masa lalu Indonesia dan strategi komunikasi modern berkorelasi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perfilman Mashuri Saleh dari tahun 1973 hingga 1977 tidak hanya mencerminkan kebijakan politik masa itu, tetapi juga membentuk sistem kontrol budaya yang terus berdampak pada kemajuan film nasional modern (Musyafa, 2025).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Objek Penelitian | : Film Tema Pendidikan Pada Masa Menteri Penerangan Mashuri Saleh (1973-1977) |
| 2. Subjek Penelitian | : Menteri Penerangan |
| 3. Tempat Penelitian | : Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, <i>Google Scholar</i> . |
| 4. Waktu Penelitian | : 2025 |
| 5. Bidang Ilmu | : Sejarah |

3.2 Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah kumpulan tindakan yang disusun secara sistematis dan terarah yang membantu para peneliti mendapatkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan metode ini, seorang peneliti berusaha untuk memahami, menguraikan, dan menjelaskan masalah yang menjadi subjek penelitian. Untuk membuat jalan penelitian jelas, proses penelitian biasanya dimulai dengan membuat masalah jelas. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang sesuai dengan jenis penelitian mereka, seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan, atau analisis dokumen. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan benar untuk memberikan gambaran deskriptif dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Kuntowijoyo (1995) metode adalah tata cara yang diterapkan dalam suatu penelitian. Metodologi menjadi bagian dari epistemologi (*sub-field of epistemology*), disebut sebagai ilmu untuk menemukan (*the science to find out*), sedangkan metode adalah cara untuk menemukan atau cara berbuat. Metode memiliki keterkaitan dengan teknik. Misalnya "metode pengumpulan data" dapat dikatakan

sebagai "teknik pengumpulan data". Maka dari itu, metodologi adalah teknik atau metode guna mengimplementasikan dan melaksanakan suatu hal melalui pikiran secara teliti agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*), yaitu serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk menelusuri, menafsirkan, dan merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang otentik. Kuntowijoyo (1995), menjelaskan metode merupakan tata cara yang diterapkan dalam penelitian agar proses pencarian data dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia menegaskan bahwa metodologi merupakan bagian dari epistemologi, yakni ilmu untuk menemukan kebenaran melalui langkah-langkah rasional dan empiris. Dengan pandangan tersebut, metode sejarah dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang objektif mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang perfilman pada masa Orde Baru, khususnya pada periode 1973–1977 ketika Mashuri Saleh menjabat sebagai Menteri Penerangan.

Kuntowijoyo (1995) menjelaskan, metode sejarah dapat digunakan untuk menelusuri peristiwa masa lalu dan membuat interpretasi yang bermakna sehingga fakta sejarah dapat membantu menjawab pertanyaan saat ini. Ia menekankan bahwa penelitian sejarah harus melalui empat tahap utama, historiografi (penulisan sejarah), heuristik (pengumpulan sumber), kritik (pengujian kredibilitas dan kebenaran sumber), dan interpretasi (penafsiran makna sumber). Pandangan ini sangat penting untuk penelitian ini karena proses pengumpulan dan analisis data tentang kebijakan Mashuri Saleh dilakukan dengan melihat literatur akademik, arsip, dan sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber ini kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat (Kuntowijoyo., 1995).

3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pelaksanaan metode penelitian sejarah yaitu mengumpulkan dan menemukan sumber-sumber serta pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan jejaknya di masa lampau terkait dengan masalah yang akan dikaji (Herlina, 2020). Sumber penelitian ini

mencakup berbagai referensi yang relevan dengan Kebijakan Menteri Penerangan terhadap Perfilman Indonesia 1973-1977. Sumber-sumber ini termasuk buku akademik, jurnal ilmiah, arsip, naskah, artikel, dan majalah yang dapat memberikan gambaran tentang konteks migrasi, perubahan sosial-budaya, dan kebijakan yang memengaruhi komunitas Muslim di Inggris. Melalui sumber-sumber ini, saya berharap dapat memperluas pemahaman saya tentang sudut pandang sosial dan politik yang berkembang pada saat itu. Beberapa sumber buku dan jurnal yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu :

- 1). Sen, Krishna, 1954-. (1994). *Indonesian cinema : framing the new order* Krishna Sen. London : Zed Books,
- 2). Said, Salim. (1991). *Profil Dunia Film Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
- 3). Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), *Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 103/Kep/Menpen/1975 tentang Penggantian Anggota Dewan Film Nasional*, Jakarta, 1975.

3.2.2 Kritik

Kritik sumber merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengkritisi sumber yang telah dikumpulkan untuk dibuktikan otentitas dan kredibilitasnya. Tujuan dilakukannya kritik yaitu untuk mencari kebenaran dimana peneliti harus dapat membedakan mana yang fakta mana yang bukan (Sjamsuddin, 2007). Dalam penelitian sejarah, informasi harus melalui proses kritik untuk divalidasi agar dapat digunakan dengan benar. Oleh karena itu, saya menggunakan kritik internal dan eksternal untuk verifikasi sumber. Kritik ini penting karena sumber sejarah tidak selalu benar dan objektif. Kritik membantu peneliti menilai sejauh mana sebuah sumber layak digunakan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah.

Saya menggunakan kritik internal untuk menilai keaslian sumber tersebut. Pada titik ini, saya berusaha untuk memastikan apakah informasi yang disajikan benar-benar didukung oleh fakta dari berbagai sumber lain atau hanya pendapat subjektif penulis. Dengan cara ini, saya dapat memilah informasi yang sangat akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, saya menggunakan kritik eksternal, yang mencakup informasi seperti tanggal, lokasi, dan orang yang membuat dokumen atau catatan,

untuk mengevaluasi kredibilitas sumber. Dengan melakukan penilaian ini, saya dapat memastikan bahwa sumber tersebut asli, sesuai dengan zamannya, dan relevan dengan topik penelitian. Setelah proses kritik ini selesai, saya baru membuat keputusan apakah sumber yang ditemukan layak untuk digunakan sebagai bahan analisis atau sebaiknya disisihkan. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian benar-benar ilmiah (Sumargono, 2021).

Kritik internal digunakan untuk menilai isi atau kandungan sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, dan karya ilmiah, seperti karya Yudo Sedio Utomo (2018), Salim Said (1991), dan Krishna Sen (1994). Kritik eksternal digunakan untuk menilai keotentikan sumber, seperti tahun penerbitan, penulis, dan konteks historis dokumen. Ini sesuai dengan periode 1973–1977 ketika Mashuri Saleh menjabat sebagai Menteri Penerangan. Proses ini memungkinkan saya untuk membedakan fakta historis dari interpretasi subjektif, yang membuat temuan penelitian lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.2.3 Interpretasi

Dalam penelitian sejarah, tahap interpretasi adalah fase penting di mana peneliti menganalisis dan menguraikan informasi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan diproses melalui proses kritis sebelumnya. Pada tahap ini, sumber-sumber ini mulai dirangkai dan dihubungkan satu sama lain untuk menjawab masalah penelitian. Tujuan interpretasi adalah untuk mengubah data yang telah diuji keasliannya menjadi cerita yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan logis. Dalam proses ini, diperlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi sumber-sumber tersebut, sehingga setiap informasi dapat ditempatkan secara historis (Basri, 2018).

Interpretasi adalah upaya menggabungkan fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan yang bermakna, lebih dari sekadar menafsirkan isi dokumen. Setelah tahap kritik sumber selesai, fakta-fakta disusun, diperiksa secara menyeluruh, dan dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan. Oleh karena itu, tahap

interpretasi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika peristiwa yang diteliti selain memberikan penjelasan deskriptif. Pada akhirnya, proses ini akan menghasilkan konstruksi sejarah yang tidak hanya akan merekam peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tetapi juga akan menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa ini berkorelasi satu sama lain dan apa artinya dalam sejarah (Yulianti, 2022). Dalam hal ini penulis membandingkan sumber mana yang mendekati kebenaran sejarah, kemudian menggunakan acuan teori- teori sebagai kesimpulan dari penulis memaksimalkan untuk memilih informasi yang akurat untuk dianalisis.

3.2.4 Historiografi

Historiografi dalam metodologi penelitian sejarah merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penelitian yang dimulai dari heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Pada titik ini, para peneliti tidak hanya menuliskan kembali peristiwa sejarah secara kronologis, tetapi juga menyusunnya menjadi cerita yang lengkap berdasarkan analisis dan penafsiran sebelumnya. Historiografi adalah teknik untuk menggabungkan informasi yang telah divalidasi menjadi kisah sejarah yang memiliki makna, relevansi, dan dapat dipahami secara ilmiah. Pada titik ini, penulisan sejarah mencerminkan perspektif peneliti tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi tetap mengikuti etika akademik dan prinsip kebenaran.

Historiografi tidak hanya mencatat peristiwa tetapi juga menghasilkan rekonstruksi sejarah yang menyeluruh dan mendalam. Karena itu, mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan dinamika peristiwa yang diteliti. Menurut Sjamsuddin (2007), adalah fase penulisan sejarah di mana peneliti tidak hanya ingin menyajikan fakta, tetapi juga menafsirkan dan merekonstruksi peristiwa berdasarkan analisis dan kritik peneliti. Ia menyatakan bahwa historiografi adalah proses kognitif yang menggabungkan informasi sejarah dengan kesimpulan ilmiah untuk menghasilkan cerita yang konsisten dan bermakna.. Menurut Sjamsuddin, penulisan sejarah harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca, sehingga historiografi menjadi wujud akhir penelitian yang memadukan keterampilan literer dengan ketelitian metodologis (Sjamsuddin, 2007).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan, arsip tertulis, surat kabar, majalah, peraturan pemerintah, foto, dan naskah resmi maupun catatan pribadi yang terkait dengan peristiwa atau subjek yang diteliti.

Teknik dokumentasi memiliki peran penting dalam penelitian saya karena sebagian besar data diperoleh dari sumber-sumber masa lampau. Dokumen tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis tetapi juga berfungsi sebagai representasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masa lalu. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti harus melakukan pilihan dengan hati-hati dan menilai kredibilitas dan keaslian dokumen. Teknik dokumentasi memungkinkan saya sebagai peneliti untuk melengkapi data yang saya peroleh dari metode lain, seperti observasi atau wawancara. Dalam penelitian tentang Kebijakan Menteri Penerangan Terhadap perfilman Indonesia 1973-1977, teknik dokumentasi sangat berguna untuk menelusuri arsip kebijakan pemerintah, berita, dokumen organisasi komunitas Muslim, dan fotofoto aktivitas keagamaan dan sosial. Setelah itu, dokumen-dokumen ini diperiksa, diperiksa, dan ditafsirkan sehingga dapat dibuat rekonstruksi menyeluruh dari peristiwa sejarah.

3.3.2 Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, Menurut Suwartono (2014) dalam bukunya, teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen,

arsip, dan laporan penilaian. Dalam penelitian ini, metode kepustakaan digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang perfilman. Penekanan khusus diberikan pada bagaimana Menteri Penerangan Mashuri Saleh membentuk lembaga seperti Dewan Film Nasional (DFN) dan Dewan Sensor Film (DSF) dari tahun 1973 hingga 1977. Suwartono berpendapat bahwa teknik kepustakaan sangat penting untuk memberikan landasan ilmiah dan memperdalam pemahaman tentang dinamika kebijakan perfilman Indonesia pada masa Orde Baru (Suwartono., 2014).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis agar meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang dikaji. (Nurdewi, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian sejarah merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan data dan peninggalan masa lampau, baik berupa catatan peristiwa, dokumen, maupun bukti-bukti lain yang berkaitan dengan keadaan di masa lalu.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik historis,. Setiap sumber yang diperoleh dipilah dan dianalisis melalui proses kritik sumber, baik kritik internal maupun eksternal, sehingga fakta yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Proses analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data, tetapi juga untuk menafsirkan dan merangkainya agar menjadi dasar penulisan sejarah yang utuh dan bermakna. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, komprehensif, dan sesuai dengan konteks zamannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perfilman pada masa Menteri Penerangan Mashuri Saleh tahun 1973–1977 menempatkan film tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pembinaan moral, dan penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat. Melalui Badan Sensor Film, pemerintah melakukan pengawasan terhadap isi film yang akan diedarkan untuk memastikan bahwa film-film tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, stabilitas nasional, dan tujuan pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, proses sensor tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian moral, tetapi juga sebagai instrumen seleksi ideologis yang menentukan nilai-nilai apa yang layak disampaikan kepada masyarakat melalui media film.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa film-film yang lolos tayang pada periode 1973–1977 umumnya mengandung nilai-nilai pendidikan yang tercermin melalui tema pendidikan formal, pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, disiplin, kerja keras, kehidupan keluarga, serta penghormatan terhadap norma-norma sosial. Film seperti *Si Doel Anak Betawi*, *Sebatang Kara*, *Rio Anakku*, *Dr. Karmila*, dan *Cintaku di Kampus Biru* menghadirkan pesan-pesan moral yang mendorong penonton untuk menghargai pendidikan, menjaga etika sosial, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang memandang film sebagai media pendidikan masyarakat dan alat pembinaan karakter bangsa.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan film memperoleh izin edar tidak hanya ditentukan oleh kualitas artistik dan komersialnya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan kepentingan ideologis negara. Film-film yang menampilkan nilai pembangunan, ketertiban sosial, pendidikan moral, dan optimisme terhadap perubahan sosial memperoleh ruang yang lebih besar untuk

diedarkan kepada publik. Sebaliknya, narasi yang berpotensi menimbulkan kritik terhadap pemerintah atau mengganggu stabilitas sosial cenderung dibatasi melalui mekanisme sensor. Temuan ini menunjukkan bahwa perfilman nasional pada masa Orde Baru merupakan bagian dari strategi negara dalam membangun hegemoni budaya melalui media massa.

Melalui perspektif Hegemonic Cinema Richard Dyer penelitian ini menyimpulkan bahwa film-film yang lolos sensor pada masa Mashuri Saleh berfungsi sebagai media penyebaran nilai-nilai dominan yang dikehendaki negara. Film menjadi sarana untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, moralitas, kedisiplinan, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, film pada periode 1973–1977 tidak hanya berperan sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial dan ideologis yang digunakan negara untuk membangun legitimasi kekuasaan, menjaga stabilitas politik, serta membentuk masyarakat yang sesuai dengan cita-cita pembangunan Orde Baru. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan sensor film pada masa Mashuri Saleh memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan isi perfilman nasional dan menjadikan film sebagai media pendidikan sekaligus alat hegemoni budaya negara.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai masukan, diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti :

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif kebijakan antar-Menteri Penerangan untuk memetakan kesinambungan strategi hegemoni. Selain itu, perluasan objek kajian pada genre film komersial dan akses terhadap arsip sensor masih asli sangat diperlukan

2. Bagi Pembaca :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif kritis dalam memahami bahwa film bukan sekadar media hiburan, melainkan instrumen politik yang mampu membentuk kesadaran kolektif melalui narasi moral dan pembangunan yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER

-Arsip Buku

- Arps, Edmund. 2018. *Performance in Java and Bali: History, Theory and Practice*. London: Routledge.
- Basri., & Sumargono, 2018. Media pembelajaran sejarah. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Dhakidae. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dyer, 1977. *Entertainment and utopia. Movie*, 24, 2–13.
- Edgar Dale. 1969. *Audiovisual Methods in Teaching* (3rd ed.). New York: Dryden Press.
- Feith, & Castles. 1970. *Indonesian political thinking, 1945-1965*. Cornell University Press.
- Hadi. 2012. Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, Volume 1(1),.
- Hadiz. 2010. *Decentralization and political economy in Indonesia*. University of Hawaii Press
- Heider. 1991. *Indonesian Cinema: National Culture on Screen*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Herlina. 2020. *Meetode Sejarah*. s.l.:Satya Historika.
- Heryanto. 2006. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatwa as Ideology*. Routledge.
- Heryanto. 2015. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Hooker. 1995. *Culture and Society in New Order Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Irawanto. 1999. Film, Ideologi, dan Militer: hegemoni militer dalam sinema Indonesia. Yogyakarta: Galang Press.
- Kristanto. 2007. *Katalog Film Indonesia 1926-2007*. Jakarta: Nalar.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Pratama, R. A., & Perdana, Y. (2022). *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi*. Penerbit Lakeisha.
- Said, Salim. 1991. Pantulan Layar Putih: Film Indonesia Dalam Kritik Dan Komentar. *Sinar Harapan*.
- Scott. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press
- Sen, Krisna. 1994. *Indonesian Cinema: Framing the New Order*. London: Zed Books.
- Sjamsuddin, 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak..
- Sumargono. 2021. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Penerbit Lakeisha.

- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Teguh Trianton. 2013. *Film sebagai Media Belajar*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Vatikiotis, Michael, 1993. *Indonesian Politics under Soeharto: Order, Development and Pressure for Change*. London: Routledge.

SUMBER SEKUNDER

- Alkhajar, 2013. Film sebagai propaganda di Indonesia. *In Forum Jurnal Ilmu Sosial*, Volume Vol. 40, No. 2.
- Ardhana. 2019. Industri Perfilman Nasional pada Masa Orde Baru. *Jurnal Sejarah Indonesia*, Volume 8(2), p. 112–128.
- Ardiyanti. 2017. Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Sebuah Telaah dari Perspektif Industri Budaya.. *Jurnal Kajian*, Volume 25(1), p. 53–70.
- Ifkar, & Narny. 2022. Film Sebagai Media Dakwah Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Film-Film Rhoma Irama (1978-1991). *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(1), 8–15.
- Khomeini, 2025. The portrayal of hegemony in the movie *V for Vendetta*. *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, 5(3), 14–27.
- Lailah, Syah, & Syaiful, M. 2013. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 1.
- Misbach, 2009. Sejarah Film 1900 - 1950. *Jakarta: Komunitas Bambu*, Volume Hlm. 27.
- Musyafa. 2025. *Strategi Komunikasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dalam Menyosialisasikan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Novia, 2006. Lambannya Pertumbuhan Perfilman Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 3(271-272).
- Nurdewi, 2022. Implementasi Personal Branding SMART ASN Perwujudan Bangsa Melayani di Provinsi Maluku Utara. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297-303.
- Prasetyo, 2015. Film Indonesia: Perkembangan Kreativitas Sineas Film Populer Masa 1999-2007. In: *Skripsi*. s.l.:Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, p. Hlm. 2.
- Utomo, Sedio 2018. Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967-1980). *Jakarta: Universitas Negeri Jakarta*.
- Yulianti, 2022. *Enrichment Materi Pembelajaran Sejarah tentang Peranan Peranakan Arab Pada Masa Pergerakan Kemerdekaan*. s.l.:s.n.
- Zatmani, 2021. Hegemoni Negara dalam Sinema Orde Baru: Studi Kasus Regulasi Departemen Penerangan 1970-an. *Jurnal Historiografi Indonesia*, 4(2), 88-105.

Zulkarnain, 2020. Hegemoni ideologi penguasa terhadap guru pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(2), 120–135.